

**EVALUASI HASIL IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) PADA
MATA PELAJARAN IPS KOMPETENSI DASAR SEJARAH
(Studi Kasus: SMP Kartika Nasional Plus Surabaya Kelas VIII Semester 1)**

Ratih Fitroh Yuliantari

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: ratihfy@gmail.com

Agus Suprijono

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Kurikulum yang diaplikasikan di sekolah sebagai acuan operasional pembelajaran merupakan salah satu kebijakan public yang jarang dievaluasi. Akibat hal tersebut, tidak banyak data implemementasi di lapangan yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan kurikulum selanjutnya. Tujuan penelitian adalah menganalisis hasil implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada pembelajaran sejarah kelas 8 di SMP Kartika Nasional Plus Surabaya.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian evaluatif yang ditujukan untuk mengumpulkan data atau informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. KTSP yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan menyelesaikan masalah pada pelaksanaan kurikulum sebelumnya akan dievaluasi menggunakan model evaluasi CIPPO (*Context, Inputs, Process, Product dan Outcome*). Penelitian dilakukan di SMP Kartika Nasional Plus Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Tenggilis No.8 Surabaya. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan November 2013. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah evaluasi kurikulum berbasis kompetensi pada mata pelajaran IPS kompetensi dasar sejarah dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literature, wawancara dan observasi. Analisa yang digunakan adalah metode analisis evaluasi kebijakan publik yang dipadukan dengan model evaluasi CIPPO (*Context, Inputs, Process, Product dan Outcome*). Instrument penelitian terdiri dari lembar wawancara, angket dan soal untuk siswa.

Hasil penelitian adalah keterlaksanaan kurikulum di SMP Kartika Nasional Plus Surabaya telah berjalan dengan cukup karena prosentase hanya mencapai 60% dari total table keterlaksanaan kurikulum dari aspek CIPPO (*Context, Inputs, Process, Product dan Outcome*). Pelaksanaan implementasi kurikulum membutuhkan lebih banyak komitmen segala pihak untuk memaksimalkan aplikasi teori dan pelaksanaan di sekolah dengan benar sesuai dengan teori yang telah disusun oleh pemerintah pusat.

Kata Kunci: *Evaluasi Kurikulum, KTSP, Kompetensi Dasar Sejarah*

ABSTRACT

Curriculum applied in school as an operational reference learning is one of the rare public policies. Due to this, not a lot of data implementation of evaluation that can be used as material for further curriculum development. The purpose of the study was to analyze the results of the implementation of the Education Unit Level Curriculum history teaching grade 8 at the SMP Kartika National Plus Surabaya.

The type of research which used in this study is the evaluative research aimed to collect data or information, to be compared with the criteria, then it is concluded. KTSP issued by the government with the aim of resolving the problem in implementation of the previous curriculum will be evaluated using the evaluation model CIPPO (Context, Inputs, Process, Product, and Outcome). The study was conducted at the SMP Kartika National Plus Surabaya located at Jalan Tenggilis no 8 Surabaya. This research was conducted from August to November 2013. The focus of this research study is to evaluate the competency-based curriculum in social studies in the history of basic competence cognitive, affective and psychomotor of students. The methods of collecting data in this research is the study of literature, interviews and observations. The analysis method is use the evaluation of public policy analysis, combined with the evaluation model CIPPO (Context, Inputs, Process, Product, and Outcome). Research instrument consisted of a questionnaire, and questions for students.

The results of feasibility study is the curriculum in SMP Kartika National Plus Surabaya has run quite as 60 percentage of total table in CIPPO (Context, Inputs, Process, Product, and Outcome) aspects. The implementation of curriculum requires more commitment from all parties to maximize the application of the theory and implementation in schools properly accordance with the theory that had been developed by the central government.

Keywords : *Curriculum Evaluation, KTSP, Basic Competence of History*

A. Pendahuluan

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah dalam sebuah lingkup, misalnya pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan negara dan sebagainya. Menurut David Easton dalam Leo Agustino, kebijakan publik yang dibuat pemerintah mengandung seperangkat nilai yang harus dialokasikan kedalam masyarakat¹. Kebijakan publik menurut Carl Friedrich dalam Subarsono lebih spesifik menyebutkan sebagai usulan yang dibuat kepada pemerintah suatu daerah tertentu dimana terdapat hambatan – hambatan dan kesempatan untuk mengusulkan kebijakan agar berguna mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan yang dimaksud².

Kurikulum pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah sejatinya merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan yang dalam penyusunannya terdapat fungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional juga bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab³.

Bangsa Indonesia harus membangun diri untuk bisa bersaing dalam banyak hal, karena itu peningkatan mutu sumber daya manusia harus menjadi prioritas pertama. Pembangunan yang dimaksud tentunya adalah pembangunan pendidikan yang terencana dan berorientasi kepada kebutuhan generasi muda di masa depan. Tantangan kehidupan di masa depan pada hakekatnya adalah tantangan terhadap kompetensi yang dimiliki manusia. Arah pengembangan kurikulum harus berbasis pada pengembangan potensi manusia yang beragam. Perlu disadari bahwa manusia dilahirkan unik dengan segala keberagaman dan kecepatannya. Kurikulum sebagai acuan dan fasilitator penyelenggaraan pendidikan, seyogyanya memberi peluang adanya kemerdekaan dan pemerataan dalam pendidikan.

Kurikulum merupakan perangkat pendidikan yang dinamis, oleh karena kurikulum juga harus peka dan sekaligus mampu merespon beragam perubahan dan beragam tuntutan *stakeholders* yang menginginkan adanya peningkatan kualitas pendidikan. Negara-negara berkembang dan negara maju di hampir seluruh dunia di era globalisasi tengah berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya dengan mengembangkan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan pada dasarnya adalah penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi yang digunakan sebagai kurikulum operasional di sekolah. Jiwa dari KTSP tetaplah pembelajaran berbasis kompetensi yang telah tersusun dalam Kurikulum berbasis kompetensi sejak tahun 2004. KTSP adalah KBK yang telah mendapat sentuhan karakteristik personal tiap sekolah karena telah diberlakukan otonomi. *Goal* dalam KBK maupun KTSP adalah siswa yang aktif, menguasai kompetensi yang diajarkan baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik serta memiliki nilai – nilai luhur bangsa Indonesia. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan diharapkan dapat memberikan perubahan pada kualitas pendidikan Indonesia dengan menekankan pada penguasaan kompetensi khususnya *life skills* melalui proses pembelajaran.

Evaluasi kebijakan publik tidak hanya berfungsi untuk menjawab apakah sebuah kebijakan dalam hal ini adalah kurikulum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jurnal pelaksanaan yang telah diberikan, melainkan juga untuk melihat dampak yang dihasilkan sebuah kebijakan terhadap masyarakat sebagai obyek pelaksanaannya. Hasil evaluasi dapat menjadi pertimbangan atas penyusunan kebijakan baru dan penyempurnaan program oleh pemerintah.

Pendekatan studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang dipilih peneliti dalam penelitian ini dengan pertimbangan kelengkapan dan kedalaman data yang diperoleh. Dalam studi kasus, evaluasi yang dilakukan dapat menyeluruh di semua aspek dan memberikan hasil yang valid. Pemilihan subyek penelitian kelas 8 SMP merupakan pertimbangan tersendiri terkait dengan momen percobaan implementasi kurikulum 2013. Saat ini kurikulum 2013 mulai diberlakukan di beberapa sekolah meski belum secara keseluruhan. Kurikulum 2013 diimplementasikan pada siswa angkatan baru tahun pelajaran 2013/2014 atau dalam jenjang sekolah menengah pertama siswa kelas 7 yang masuk mulai bulan juni 2013. Penelitian implementasi KTSP pada siswa kelas 8 SMP masih relevan dikarenakan kurikulum operasional yang digunakan masih menggunakan KTSP, belum menggunakan Kurikulum 2013. Besar harapan penulis bahwa penelitian ini nantinya dapat menyumbangkan sesuatu bagi perkembangan pembelajaran sejarah ditahun – tahun berikutnya.

Tujuan penelitian adalah menganalisis hasil implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada pembelajaran sejarah kelas 8 di SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Diharapkan dengan adanya analisis terhadap implementasi KTSP, dapat disimpulkan apakah KTSP sudah diimplementasikan dengan baik ataukah belum melalui data yang didapat meliputi kemudahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi para *stakeholder* dalam menerapkan kurikulum tersebut.

¹Ag Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm 3

²Leo Agustino. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*.

Bandung: Alfabeta hlm 7

³ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 Bab I Hlm 3

B. Kajian Pustaka

1. Evaluasi

Depdiknas mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang umumnya diperoleh melalui pengukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program pendidikan⁴. Evaluasi dilaksanakan untuk menguji obyek/ kegiatan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Senada dengan Depdiknas, McMillan dan Schumacher dalam Joko Widodo (2007) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu penerapan dari penelitian yang digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya atau apakah ada manfaat/nilai dari suatu program atau kebijakan⁵.

Definisi tentang evaluasi yang dikemukakan para ahli tersebut dapat ditarik benang merah bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk menentukan berhasil atau tidaknya atau apakah ada manfaat/nilai dari suatu program/kebijakan dalam pendidikan dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya.

2. Perbedaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

a) Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai pebelajar, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah⁶. Menurut paparan ahli pendidikan dalam MATEC tahun 2001 dalam Mulyasa,

*A competency-based curriculum starts with identification of the competencies each learner is expected to master, states clearly the criteria and condition by which performance will be assessed, and defines the learning activities that will lead to the learner to mastery of the targeted competency*⁷.

Kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas – tugas dengan standar performansi tertentu,

sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.

Kurikulum berbasis kompetensi memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sesuai dengan potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik serta kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah. Silabus KBK dikembangkan oleh tiap sekolah, sehingga dimungkinkan beragamnya kurikulum antar sekolah atau wilayah tanpa mengurangi kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional (standar akademis)⁸.

b) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disingkat KTSP adalah kurikulum yang dilaksanakan pemerintah sebagai penyempurna Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan namanya, KTSP adalah implementasi KBK yang memiliki otonomi lebih luas di tiap satuan pendidikan. Dalam KTSP, setiap sekolah memiliki hak penuh dalam menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan potensi sekolah, potensi budaya sekitar, karakteristik sekolah maupun daerah, karakteristik peserta didik bahkan keadaan sosial masyarakat sekitar masyarakat setempat⁹.

KTSP sekilas terlihat seperti memiliki konsep yang berbeda dengan KBK. Namun apabila ditilik lebih lanjut KTSP sebenarnya justru melengkapi KBK. Kedua kurikulum ini menekankan adanya partisipasi siswa yang lebih dominan dalam rangka menyiapkan peserta didik menghadapi dunia global. KTSP dalam pelaksanaannya tetap menggunakan KBK sebagai jantung yang menjiwai seluruh proses yang dijalankan.

Kebutuhan dunia sekarang yang seolah tampak *borderless* memaksa setiap manusia untuk memiliki kecakapan hidup (*life skills*). Memasuki milenium baru, siswa yang di tahun 2013 ini tengah menuntut ilmu akan menjadi warga dunia yang memiliki tingkat persaingan ketat. Persaingan itu bahkan tidak terjadi diantara warga Indonesia saja melainkan kompetisi langsung dengan warga diseluruh dunia. Berangkat dari hal itu maka KTSP dipandang perlu untuk memaksimalkan peningkatan mutu pendidikan kita. Enco Mulyasa berpendapat dalam bukunya Kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2007, sekolah memiliki semboyan *full authority and responsibility* dalam menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang berlangsung sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah. Meskipun begitu, pemerintah melalui dewan pendidikan¹⁰ tetap mengontrol tujuan sekolah tetap sejalan dengan tujuan pendidikan nasional¹¹.

⁴ Hamid Hasan. 2008. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya hlm 33

⁵ Joko Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing hlm 111

⁶ Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Pelayanan Profesional Kurikulum 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi*, - Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas hlm 3

⁷ E. Mulyasa. 2006. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung : Remaja Rosdakarya hlm 13

⁸ *Ibid* hlm 27

⁹ E. Mulyasa. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya hlm 8

¹⁰ Badan ini merupakan lembaga yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah setempat, komisi pendidikan pada dewan perwakilan rakyat, pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, tenaga kependidikan, perwakilan orang tua peserta didik dan tokoh masyarakat. *Ibid* hlm 22

¹¹ E. Mulyasa. *Op cit* hlm 10

Konsep dasar KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing – masing. Kurikulum ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berfungsi untuk memaksimalkan pendidikan kembali menjadi milik masyarakat. Artinya, dalam kurikulum ini keterlibatan dan partisipasi masyarakat diberi ruang lebih untuk kemajuan kompetensi anak didik. Reformasi kurikulum ini memiliki benang merah yang sama dengan konsep desentralisasi di pemerintahan yaitu perluasan otonomi dan penguatan karakteristik masing – masing daerah. KTSP memiliki tujuan besar demi kemajuan pendidikan bangsa ini dalam penerapannya. Tujuan secara garis besar KTSP adalah memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum.¹² Secara khusus tujuan KTSP adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian pemberdayaan sumber daya alam, meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat, serta meningkatkan kompetisi antar satuan pendidikan sehingga tercipta inovasi dan peningkatan kualitas pendidikan.

D. Pendidikan Sejarah

Burckhardt dalam Kochhar mengatakan bahwa sejarah merupakan catatan tentang suatu masa yang ditemukan dan dipandang bermanfaat oleh generasi dari zaman yang lain. Sedangkan Miller memandang catatan perjalanan hidup manusia bagaikan samudra, orang datang dan pergi, mengisahkan perkembangan dan kejatuhan, dan itulah yang disebut sebagai sejarah¹³. Pendidikan sejarah dapat pula diartikan sebagai proses yang mengajarkan seseorang (siswa) tentang perjalanan kebudayaan manusia dari masa ke masa yang bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan siswa. Menurut SK Kochhar, tujuan pembelajaran sejarah adalah:

1. Mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri
2. Memberikan gambaran yang tepat tentang konsep waktu, ruang dan masyarakat.
3. Membuat masyarakat mampu mengevaluasi nilai – nilai dan hasil yang telah dicapai oleh generasinya.
4. Mengajarkan toleransi.
5. Menanamkan sikap intelektual.
6. Memperluas cakrawala intelektualitas.
7. Mengajarkan prinsip – prinsip moral.
8. Menanamkan orientasi ke masa depan.
9. Memberikan pelatihan mental.
10. Melatih siswa menangani isu – isu controversial.
11. Membantu mencari jalan keluar bagi berbagai masalah sosial dan perseorangan.
12. Memperkokoh rasa nasionalisme.
13. Mengembangkan pemahaman internasional.

¹² Ibid hlm 22

¹³ S.K Kochhar. 2008. *Pembelajaran Sejarah: Teaching Of History*. Jakarta: Grasindo hlm. 2

14. Mengembangkan keterampilan – keterampilan yang berguna¹⁴.

Tujuan pembelajaran yang begitu banyak membuat pendidikan sejarah merupakan salah satu pembelajaran yang penting bagi proses pendidikan di Indonesia. Dengan belajar sejarah, diharapkan siswa dapat mendapatkan manfaat dari pengetahuan masa lalu dengan menjadi siswa yang arif dan bijaksana.

3. Metode Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian evaluatif yang ditujukan untuk mengumpulkan data atau informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan¹⁵. Penelitian evaluatif memiliki kesamaan dengan metode deskripsi dalam menggambarkan kondisi nyata sebuah pelaksanaan program kebijakan di lapangan. Perbedaannya terletak pada berbagai persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi penelitian evaluatif untuk membandingkan data yang diperoleh sebagai sebuah kondisi nyata dari objek yang diteliti. Hasil kesimpulan dalam penelitian evaluatif disebut sebagai hasil evaluasi yang dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan pihak pembuat kebijakan contohnya oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi harapan yang dinyatakan dalam kriteria itulah yang dicari. Kesenjangan tersebut kemudian memberi gambaran apakah objek yang diteliti sudah sesuai, kurang sesuai, atau tidak sesuai dengan kriteria.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan menyelesaikan masalah pada pelaksanaan kurikulum sebelumnya akan dievaluasi menggunakan model evaluasi CIPPO (*Context, Inputs, Process, Product dan Outcome*). Model CIPPO berfokus mengevaluasi sebuah kebijakan atau program berdasarkan komponen konteks, masukan, proses, produk, dan keluaran yang dipelajari melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan¹⁶.

Pemilihan jenis penelitian evaluatif didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis penelitian ini dapat lebih menggambarkan sebuah pelaksanaan kurikulum yang ada di sebuah sekolah dengan menggunakan deskripsi peristiwa – peristiwa secara jelas. Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk memfokuskan evaluasi pada sebuah obyek secara menyeluruh. Melalui studi kasus, proses evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di sebuah sekolah akan dijelaskan secara rinci diseluruh aspek melalui deskripsi data dan analisis. Deskripsi yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis implementasi kurikulum berbasis kompetensi pada mata pelajaran IPS kompetensi dasar sejarah kelas 8 di SMP Kartika Nasional Plus Surabaya.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta hlm. 36

¹⁶ Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara hlm 45 - 48

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi literatur

Studi literatur ini didapat dari penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu buku – buku yang berkaitan dengan kerangka pemikiran dan teori yang ada serta relevan dengan pokok bahasan yang diteliti, mempelajari penelitian-penelitian terdahulu tentang evaluasi kurikulum sejarah, serta dokumen-dokumen lain yang merupakan sumber data penting sebagai landasan teori kurikulum berbasis kompetensi sejak tahun 2004 hingga sekarang. Dokumen – dokumen itu antara lain peraturan menteri pendidikan nasional tentang penetapan kurikulum berbasis kompetensi di semua tingkat satuan pendidikan tahun 2004.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka (*face to face*) secara langsung dengan cara berdialog dan tanya jawab. Wawancara yang pertama dilakukan kepada Kepala SMP Kartika Nasional Plus Surabaya dan Guru Mata Pelajaran IPS yang mengajar kompetensi dasar sejarah kelas 8 sedangkan wawancara kedua dilakukan terhadap lima orang responden yaitu siswa – siswi kelas 8 SMP Kartika Nasional Plus Surabaya.

Wawancara akan fokus pada pertanyaan – pertanyaan seputar pelaksanaan KBK di sekolah ini dan sejauh apa upaya memaksimalkan teori kurikulum dalam pembelajaran yang sebenarnya. Daftar pertanyaan akan disusun agar wawancara tidak melebar dan fokus terhadap pelaksanaan dan hambatan yang terjadi dalam upaya pencapaian kompetensi yang ada pada KBK khususnya pembelajaran sejarah kelas 8.

3. Dokumen

Dokumen yang dicermati dalam penelitian ini adalah:

- RPP Mata Pelajaran IPS Kelas 8 tahun ajaran 2013/2014
- Kurikulum SMP Kartika Nasional Plus Surabaya
- Rekaman proses belajar mengajar Sejarah Kelas 8

4. Observasi atau pengamatan implementasi pelajaran sejarah dalam proses belajar mengajar di kelas.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Peneliti mengevaluasi hal – hal yang berkenaan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan tahapan – tahapan evaluasi kebijakan publik menurut Edward A. Schuman dalam Nugroho. Adapun 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

- Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- Analisis terhadap masalah
- Deskripsi dan Standarisasi kegiatan
- Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
- Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak¹⁷.

Enam langkah evaluasi kebijakan publik versi Schuman akan dipadukan dengan model evaluasi CIPPO (*Context, Inputs, Process, Product dan Outcome*) yaitu evaluasi pada komponen konteks, masukan, proses, produk, dan keluaran. Model evaluasi ini dianggap sesuai dengan tujuan evaluasi implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang berfokus pada kebijakan yang menekankan pada proses. Langkah yang pertama adalah evaluasi konteks, yaitu mendeskripsikan tujuan implementasi kebijakan serta lingkungan lokasi penerapan kebijakan tersebut.

Langkah kedua adalah evaluasi masukan yaitu mendeskripsikan kemampuan awal siswa dan sekolah dalam menunjang penerapan kurikulum berbasis kompetensi, misalnya kemampuan sekolah dalam mengadopsi kurikulum yang diberikan pemerintah dan kesiapan guru serta sarana dan prasarana sekolah.

Langkah ketiga adalah evaluasi proses yaitu menunjuk pada penanggung jawab penerapan kurikulum berbasis kompetensi di sekolah dan hambatan yang dijumpai selama pelaksanaan program. Pada evaluasi komponen proses, kurikulum berbasis kompetensi akan dievaluasi dengan menggunakan tahapan evaluasi menurut Suharsimi Arikunto dalam penelitian evaluatif. Adapun enam langkah tersebut adalah:

- Identifikasi komponen
- Identifikasi indikator
- Identifikasi bukti – bukti
- Menentukan sumber data
- Menentukan metode sumber pengumpulan data
- Menentukan instrumen pengumpulan data¹⁸

Tahap pertama yang dicermati dalam penelitian evaluatif tentang implementasi KBK pada pelajaran Sejarah dalam KTSP adalah komponen – komponen dari kurikulum berbasis kompetensi. Empat komponen yang terdapat didalam kurikulum antara lain tujuan, materi, metode dan evaluasi.

¹⁷ Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo hlm. 199
¹⁸ Suharsimi Arikunto. *Op Cit*. hlm 43

A. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, hal ini karena analisis data menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data situasi, peristiwa, dan konsepsi yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Data dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis evaluasi kebijakan publik yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan dampak implementasi

Indikator dari tiap – tiap komponen merupakan hal yang harus dicermati pada tahap kedua, yaitu mengidentifikasi indikator. Indikator dari tujuan ada empat yaitu tujuan pendidikan nasional yang ada di UUD 1945, tujuan institusional yaitu SMP Kartika Nasional Plus Surabaya atau lebih dikenal sebagai visi misi sekolah, tujuan kurikuler yaitu tujuan mata pelajaran IPS, dan terakhir adalah tujuan instruksional yaitu tujuan pembelajaran IPS kompetensi dasar sejarah.

Komponen kedua yaitu materi pembelajaran memiliki tiga indikator yaitu kesesuaian dengan materi menurut SK, KD dan sesuai dengan indikator pembelajaran. Komponen ketiga yaitu metode memiliki tiga indikator yaitu rencana pembelajaran, metode dan perangkat pembelajaran. Sedangkan komponen terakhir yaitu evaluasi memiliki dua indikator berupa tes dan non tes.

Indikator yang telah disusun dari tiap komponen kemudian dicari bukti – buktinya dari sumber data, dikumpulkan melalui metode pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Data yang telah didapat dan diolah, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan tentang hasil evaluasi implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi pada mata pelajaran IPS kompetensi dasar sejarah dalam KTSP di SMP Kartika Nasional Plus Surabaya.

Langkah keempat selanjutnya pada evaluasi model CIPPO adalah evaluasi produk mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada siswa setelah penerapan KBK sebagai jawaban atas proses pencapaian tujuan sebuah kebijakan. Sedangkan evaluasi keluaran mendeskripsikan hasil akhir siswa setelah penerapan KBK dalam pembelajaran sejarah di sekolah dan dampak kegunaan dalam diri siswa sebagai gambaran bahwa upaya pencapaian tujuan penguasaan kompetensi telah dilaksanakan.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Penilaian Konteks (*Context*)

SMP kartika berada di kota Surabaya bagian timur dan masuk ke dalam kelurahan Tenggilis, kecamatan Tenggilis. Bangunan sekolah terletak dipinggir jalan raya tenggilis. Akses ke sekolah ini cukup mudah dijangkau oleh kendaraan umum maupun pribadi. Bangunan fisik sekolah berlantai dua dengan desain minimalis disertai halaman kecil yang digunakan untuk parkir kendaraan. Sesuai dengan yang tertulis pada kurikulum SMP Kartika Nasional Plus, kelemahan sekolah yang perlu mendapat perhatian antara lain luas lahan yang tidak standar, lapangan olahraga yang tidak memadai, tupoksi serta partisipasi komite sekolah belum maksimal. Tantangan lain dari segi fisik adalah lokasi sekolah merupakan daerah rawan banjir.

Kurikulum berbasis kompetensi telah digunakan di SMP Kartika Nasional Plus Surabaya sejak tahun 2009. Kurikulum yang ditetapkan pemerintah saat itu menjadi alasan utama sekolah menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sri Gunantaini sebagai kepala sekolah,

“kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan visi sekolah yaitu mendidik siswa yang disiplin, mandiri, cerdas, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan KBK sesuai dengan misi sekolah secara spesifik yaitu meningkatkan keterampilan akademik maupun non akademik. Non akademik yang dimaksudkan lebih dititik beratkan kepada kemampuan sosial siswa dan wawasan kewirausahaan untuk meningkatkan mutu tamatan yang siap menghadapi tantangan hidup dan kehidupan.”¹⁹

Sesuai dengan yang telah diutarakan ibu Sri sebagai kepala sekolah, kurikulum berbasis kompetensi yang menjiwai kurikulum tingkat satuan pendidikan telah memiliki tujuan yang sama dengan visi dan misi sekolah secara khusus yaitu mendidik siswa yang disiplin, mandiri, cerdas dan diatas semua itu siswa haruslah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. KTSP sebagai kurikulum operasional sekolah memang telah mendapatkan sentuhan personal setiap institusi pendidikan. Dalam KTSP karakter sebuah sekolah menjadi cirri khas yang menarik untuk dikembangkan sebagai wadah pengembangan potensi siswa. Di SMP Kartika Nasional Plus, latar belakang siswa yang mayoritas berasal dari kalangan swasta mengilhami kepala sekolah untuk mengembangkan cirri khas sekolah ke arah wirausaha. Kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan tentang pencapaian sebuah kompetensi secara aplikatif seolah menjawab impian kepala sekolah untuk mengembangkan jiwa wirausaha di kalangan siswa. Tujuannya jelas untuk memotivasi siswa untuk menjadi wirausaha yang maju dan pada akhirnya dapat menjawab tantangan dunia kerja selepas sekolah. Pemberian pengetahuan tentang pentingnya berwirausaha merupakan pencapaian secara nyata sebuah aplikasi kurikulum berbasis kompetensi di sekolah. Siswa tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari – hari untuk menunjang masa depan mereka kelak.

Hasil pengamatan yang dilakukan, sebagian besar siswa SMP Kartika tergolong dalam kelas sosial menengah ke atas. Komposisi terbesar adalah keturunan tionghoa. Partisipasi orang tua siswa cukup aktif dalam memberi masukan terhadap proses belajar mengajar meski terkesan terlalu *overprotective*.

Selain pengamatan pada siswa, pengamatan juga dilakukan pada fasilitas dan proses belajar yang dilakukan sekolah dalam mencapai visi misi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan KBK.

Kebutuhan utama untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi di SMP Kartika Nasional Plus ditunjang dalam beberapa kekuatan antara lain jumlah guru yang memadai dengan latar belakang

¹⁹ Wawancara dengan kepala SMP Kartika Nasional Plus Surabaya Ibu Sri Gunantaini pada tanggal 29 Oktober 2013 pukul 13.55 berlokasi di ruang kepala sekolah SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Selengkapnya ada di lampiran hasil wawancara dengan kepala sekolah.

pendidikan yang sesuai, fasilitas cukup lengkap, kedekatan personal antara guru dan murid, serta input siswa yang relatif baik. Kekuatan tersebut menjadi landasan utama sekolah untuk ikut menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi dan pendidikan berkarakter.

2. Penilaian Masukan (*Input*)

a. Kurikulum

Sejak pertama kali berdiri ditahun 2009, SMP Kartika Nasional Plus telah menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi sesuai dengan yang diinstruksikan kementerian pendidikan secara nasional. Semenjak tahun 2006, pengembangan KBK menjadi KTSP turut pula diaplikasikan SMP Kartika Nasional Plus sebagai kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing – masing satuan pendidikan berlandaskan pada standar kompetensi dan standar isi yang dibentuk pemerintah. Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh SMP Kartika Nasional Plus berdasarkan beberapa prinsip, yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan, prinsip kedua adalah beragam dan terpadu, prinsip ketiga tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, prinsip keempat relevan dengan kebutuhan hidup, prinsip kelima menyeluruh dan berkesinambungan, prinsip keenam adalah belajar sepanjang hayat, prinsip ketujuh adalah seimbang antara kepentingan nasional dan daerah.

Visi dan misi SMP Kartika Nasional Plus didasarkan pada tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar serta tuntutan standar kompetensi lulusan. Adapun visi SMP Kartika Nasional Plus adalah mendidik siswa yang disiplin, mandiri, cerdas, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan misi SMP Kartika Nasional Plus adalah memberikan kontribusi kepada masyarakat dan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas tinggi dengan membangun generasi muda yang berwawasan global, memiliki kemandirian, moral yang terpuji, kepedulian sosial yang melayani dan jiwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai – nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Struktur kurikulum pada mata pelajaran IPS merupakan pola yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang dituangkan pada kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Mata pelajaran IPS termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan substansi sebagai IPS terpadu.

Dalam tabel alokasi waktu tiap mata pelajaran, tertulis Ilmu Pengetahuan Sosial pada tiap jenjang kelas dialokasikan empat jam pelajaran tiap minggu. Masing – masing jam pelajaran adalah 40 menit. Berdasarkan kurikulum yang disusun SMP Kartika Nasional Plus, mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan pada kehidupan di masyarakat. Siswa diharapkan akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu sosial. Tujuan mata pelajaran IPS antara lain:

1. Mengenal konsep – konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya.
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial.
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai – nilai sosial dan kemanusiaan.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat majemuk, di tingkat local, nasional dan global.

Ruang lingkup dalam mata pelajaran IPS terdiri dari empat aspek yaitu manusia, tempat dan lingkungan (geografi), waktu, keberlanjutan, dan perubahan (sejarah), sistem sosial dan budaya (sosiologi) serta perilaku ekonomi dan kesejahteraan (ekonomi).

b. Siswa

Jumlah siswa pada tahun ajaran 2013/2014 berdasar pada data yang dihimpun tata usaha SMP Kartika Nasional Plus, kelas VII dan VIII terbagi dalam dua kelas dengan rincian 22 orang di kelas 7.1, 22 orang di kelas 7.2, 21 orang di kelas 8.1 serta 20 orang siswa di kelas 8.2. Sedangkan kelas 9 yang berjumlah 28 orang digabungkan ke dalam satu kelas saja. Secara global, latar belakang ekonomi sosial sebagian besar siswa tergolong kelas menengah ke atas dengan prosentase terbesar siswa berasal dari keturunan tionghoa serta agama yang dominan adalah kristen dan katolik²⁰. Komposisi kelas juga dilakukan keberagaman dalam agama. Siswa yang beragama hindu, budha maupun islam disebar kedalam kelas yang berbeda bersama – sama dengan murid lain yang beragama Kristen atau katolik. Diharapkan akan tercipta kerukunan antar umat beragama dan mengajari siswa secara langsung untuk menghormati umat beragama lain.

c. Guru

Jumlah guru yang mengajar di SMP Kartika Nasional Plus berjumlah 19 orang. Latar belakang pendidikan 18 guru adalah sarjana baik pendidikan maupun murni dan satu orang DIII²¹. Sebagian besar guru dan pengajar di SMP Kartika Nasional Plus baru memulai karir sebagai pengajar setelah lulus dari universitas masing – masing. Kepala sekolah menuturkan,

“Guru – guru SMP Kartika Nasional Plus memiliki keragaman tingkat adaptasi dalam hal mengajar siswa. Meskipun begitu semua guru dirangkul untuk bersama – sama belajar dalam mendidik siswa tanpa terkecuali. Para guru di SMP Kartika Nasional Plus

²⁰ Selengkapnya di lampiran data siswa.

²¹ Selengkapnya di lampiran data guru dan karyawan.

juga dituntut untuk terus dinamis mengikuti perkembangan kurikulum dan melakukan inovasi dalam pembelajaran. Dalam rentang waktu yang berbeda – beda akhirnya guru dapat beradaptasi sesuai dengan visi dan misi SMP Kartika Nasional Plus.”²²

Guru yang mengajar di SMP Kartika Nasional Plus diharapkan juga berasal dari latar belakang pendidikan yang sesuai. Untuk mata pelajaran IPS, terutama kompetensi – kompetensi dasar sejarah kelas 8 diajar oleh bapak Andhy. K.F S.Pd. Bapak Andhy merupakan sarjana pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Surabaya. Di SMP Kartika Nasional Plus, selain mengajar sejarah untuk kelas 8, Pak Andhy juga mengajar seni rupa, dan geografi di kelas 7.

d. RPP

Proses pembelajaran IPS di SMP Kartika Nasional Plus sedikit berbeda dengan yang ditulis dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berikut hasil wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah,

“Secara teknis mata pelajaran IPS di SMP kartika nasional plus tidak diajarkan secara terpadu seperti yang instruksikan dalam kurikulum. Mata pelajaran sejarah, geografi, serta ekonomi tidak diajarkan secara terpadu dan tematik melainkan terpisah seperti pada kurikulum sebelumnya. Secara tidak langsung di SMP Kartika Nasional Plus terdapat mata pelajaran sejarah, geografi dan ekonomi yang diajarkan sendiri – sendiri dengan guru yang berbeda di tiap kelas.”²³

Pembelajaran IPS yang diajarkan secara terpisah sesungguhnya tidak sesuai dengan anjuran kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pembelajaran IPS yang diajarkan secara terpisah tidak akan memiliki tujuan pembelajaran sama dan berakibat pada upaya pencapaian siswa di sisi kognitif saja. Sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, sejarah diajarkan oleh guru yang berbeda dan memiliki tujuan pembelajaran yang terpisah dari mata pelajaran geografi dan ekonomi. Hal tersebut tentu saja membuat tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi IPS terpadu menjadi tidak sesuai.

²² Wawancara dengan kepala SMP Kartika Nasional Plus Surabaya Ibu Sri Gunantaini pada tanggal 29 Oktober 2013pukul 13.55 berlokasi di ruang kepala sekolah SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Selengkapnya ada di lampiran hasil wawancara dengan kepala sekolah.

²³ Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Sejarah kelas 8 SMP Kartika Nasional Plus Surabaya Bapak Andhy pada tanggal 29 Oktober 2013pukul 14.53 berlokasi di ruang guru SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Selengkapnya ada di lampiran hasil wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah.

Untuk pelajaran IPS kompetensi dasar sejarah diajar oleh bapak Andhy dan memiliki alokasi waktu 1 jam pelajaran per minggu setiap kelas 8 dengan durasi waktu 40 menit. Sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, rencana pembelajaran IPS kompetensi dasar sejarah yang dirancang juga dibuat secara terpisah. Tujuan pembelajaran, metode, sumber belajar, materi maupun penilaian pada pembelajaran sejarah sehari – hari dilakukan secara terpisah meskipun di ujian sub sumatif maupun sumatif, proses evaluasi dilakukan menjadi satu. Teknis pembagian komposisi soal sejarah untuk ujian sumatif dan sub sumatif disesuaikan dengan kesepakatan guru yang mengajar IPS kompetensi dasar geografi dan ekonomi. Ketetapan mengajarkan mata pelajaran secara terpisah menurut guru mata pelajaran IPS kelas 8 disebabkan pandangan adanya ketidaksinambungan antara sejarah dan geografi dalam disiplin ilmunya. Menurut pak andhy,

“Ketika dipadukan ilmu sejarah dengan geografi menjadi tidakimbang dan menjadi tidak mendalam secara materi. Beberapa kali terjadi materi geografi lebih mendominasi sehingga materi sejarah seperti hanya menjadi pelengkap. Menurut saya lebih mudah mengajar sejarah secara terpisah dibanding diajarkan secara terpadu. Dari segi serapan materi oleh siswa maupun penilaian saat evaluasi, mengajarkan mata pelajaran sejarah secara terpisah lebih optimal dan efektif. Ketercapaian secara kognitif relative mudah tercapai saat pelajaran sejarah diajarkan terpisah, bukan dalam format IPS terpadu.”²⁴

Kesulitan dalam menggabungkan sejarah dan geografi yang dihadapi pak Andhy merupakan permasalahan yang wajar dihadapi oleh guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Materi sejarah dianggap kalah dominan dengan materi geografi apabila disajikan secara terpadu. Keresahan guru khususnya yang mengajar sejarah apabila penguasaan materi kognitif tidak tercapai oleh siswa telah membayangkan – bayangi sekolah sehingga memutuskan untuk tidak menyelenggarakan IPS secara terpadu, melainkan dipisah sesuai bidang ilmu. Diharapkan dengan diajarkan secara terpisah, siswa dapat menguasai materi sejarah lebih mudah dan tidak kesusahan dalam mengerjakan soal ujian.

e. Program pendukung

Program pendukung pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi mata pelajaran IPS kompetensi dasar sejarah di SMP Kartika Nasional Plus tidak tertulis secara spesifik di dalam kurikulum sekolah. Secara umum sekolah selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam mengaplikasikan kurikulum berbasis kompetensi di setiap

²⁴ Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Sejarah kelas 8 SMP Kartika Nasional Plus Surabaya Bapak Andhy pada tanggal 29 Oktober 2013pukul 14.53 berlokasi di ruang guru SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Selengkapnya ada di lampiran hasil wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah.

proses pembelajaran khususnya mata pelajaran IPS kompetensi dasar sejarah. Ketika Kepala sekolah diberikan pertanyaan tentang program pendukung jalannya kurikulum tingkat satuan pendidikan, beliau mengungkapkan,

“Pembelajaran didalam kelas yang inovatif, aktif, kreatif dan efektif menjadi salah satu program pendukung pencapaian tujuan program. Kegiatan *field trip* kami dilakukan meski tidak ke situs – situs sejarah yang berhubungan langsung dengan mata pelajaran IPS kompetensi dasar sejarah. Kami melakukan *field trip* ke Malang ke tempat – tempat industri sehingga siswa dapat belajar secara langsung.”²⁵

Selain *field trip*, kepala sekolah juga menuturkan adanya kegiatan evaluasi diantara guru – guru. Lebih lanjut menurut beliau,

“Kami selalu menyelenggarakan kegiatan evaluasi setiap tiga bulan sekali, mbak. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan tiap guru untuk memberikan perhatian lebih bagi siswa yang ketinggalan dalam pelajaran. Siswa yang nilainya merosot akan kami berikan perhatian lebih. Kami akan memikirkan solusinya dan guru akan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada orang tua dan wali murid untuk bersama – sama mencari solusi atas masalah tersebut. Pendekatan individu merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan SMP Kartika Nasional Plus dalam menjembatani orang tua yang ingin memantau hasil belajar anak – anak mereka. Nama Plus dalam sekolah kami mengacu pada pendekatan personal kami sebagai nilai lebih atau plus dari SMP Kartika Nasional.”²⁶

Kepala sekolah bercerita pada awalnya kegiatan evaluasi yang berujung pada pemberian perhatian khusus pada siswa tertentu bukanlah kegiatan khusus di sekolah. Guru dan pihak sekolah hanya berusaha menciptakan suasana yang mendukung aplikasi kurikulum tingkat satuan pendidikan di sekolah. Namun belakangan kegiatan ini sangat populer di lingkungan orang tua dan para guru karena berhasil mendekatkan keduanya dalam memaksimalkan usaha penyelenggaraan pendidikan di sekolah mereka. Pada akhirnya pendekatan secara personal yang dilakukan antara guru dan murid menjadi nilai

tambah sekolah di mata orang tua siswa. Bahkan tambahan *plus* dalam nama SMP Kartika Nasional Plus kini diidentikkan dengan pendekatan personal antara siswa yang dipelopori oleh sekolah dalam mengembangkan siswa – siswinya.

f. Dana operasional dan lembaga pendukung

SMP Kartika Nasional Plus adalah salah satu sekolah swasta yang secara mandiri melakukan pembiayaan atas operasional sekolah. Sumber dana adalah sumbangan orang tua siswa yang dikelola yayasan kartika. SMP Kartika Nasional Plus tidak mendapatkan biaya operasional sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah. Dana mandiri yang dikelola yayasan digunakan untuk penambahan fasilitas yang menunjang pembelajaran seperti pemasangan wifi, proyektor tiap kelas, dan melengkapi buku yang ada di perpustakaan sekolah. Selain itu yayasan juga berkomitmen memberikan mensubsidi biaya SPP untuk membantu siswa yang kurang mampu.

Upaya pemberian bantuan pembebasan SPP bagi siswa yang kurang mampu merupakan langkah sekolah dalam tanggung jawab sosial menyelenggarakan pendidikan secara merata. Sekolah berupaya memperluas akses pendidikan meski latar belakang ekonomi keluarga siswa secara materi kurang. Program tersebut digagas oleh sekolah dan disetujui oleh yayasan pengelola SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Pemberian bantuan secara materi diharapkan dapat memotivasi siswa yang bersangkutan untuk terus maju dan meraih cita – citanya sesuai dengan tujuan masing – masing.

3. Penilaian Proses (*Process*)

a. Tujuan dan isi materi pembelajaran

Tujuan dan isi materi pembelajaran IPS kompetensi dasar sejarah sesuai dengan yang tertera di standar kompetensi. Menurut hasil wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah adalah sebagai berikut,

“Kemampuan siswa disini cenderung merata mbak khususnya untuk mata pelajaran sejarah sehingga tidak ada modifikasi khusus pada kurikulum. Saya mengajar sesuai dengan RPP yang saya susun. Lagi pula hanya satu jam pelajaran tiap minggu. Saya kejar – kejaran dengan materi untuk ujian.”

Kemampuan siswa yang cenderung merata diakui pak Andhy memudahkan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa memiliki keseragaman waktu dalam memahami materi sejarah sehingga guru membuat rancangan pembelajaran secara umum. Materi pembelajaran digunakan untuk mengembangkan perilaku berakhlak dan tujuan pembelajaran ke dalam tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

b. Alokasi waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran IPS kompetensi dasar sejarah adalah 40 menit tiap minggu

²⁵ Wawancara dengan kepala SMP Kartika Nasional Plus Surabaya Ibu Sri Gunantaini pada tanggal 29 Oktober 2013 pukul 13.55 berlokasi di ruang kepala sekolah SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Selengkapnya ada di lampiran hasil wawancara dengan kepala sekolah.

²⁶ Wawancara dengan kepala SMP Kartika Nasional Plus Surabaya Ibu Sri Gunantaini pada tanggal 29 Oktober 2013 pukul 13.55 berlokasi di ruang kepala sekolah SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Selengkapnya ada di lampiran hasil wawancara dengan kepala sekolah.

untuk setiap kelas. Pembelajaran dilakukan pada jam 07.00 – 13.30 selama lima hari mulai senin sampai jumat. Alokasi waktu tersebut biasanya digunakan guru untuk menjelaskan materi kompetensi dasar sejarah untuk mengejar tenggat materi saat ujian sumatif. Pak Andhy guru sejarah kelas 8 mengungkapkan,

“Alokasi waktu tersebut sangat terbatas mbak. Kalau saya ingin menggunakan berbagai metode dan sumber pembelajaran lain menjadi kesulitan. Meskipun begitu, kalau sejarah tidak digabung (dengan IPS terpadu) tetap memberikan keuntungan karena materi tidak melompat – lompat sesuai dengan tuntutan tematik, melainkan runtut.”²⁷

Alokasi waktu yang terbatas menjadi penghalang bagi guru untuk menyelenggarakan pembelajaran secara beragam. Metode dan sumber pembelajaran yang beragam membutuhkan waktu yang cukup banyak sehingga tidak bias dilaksanakan pada pembelajaran sejarah yang hanya 40 menit. Meskipun begitu menurut pak Andhy keruntutan materi pembelajaran sejarah menjadi kelebihan saat ujian. Siswa mengaku lebih mudah mengerti materi dan dapat mengerjakan soal dengan baik.

Siswa sebagai partisipan pembelajaran merasakan pembelajaran sejarah yang diajarkan pak andhy memang tidak begitu variatif karena hanya menjelaskan materi pembelajaran dengan ceramah. Namun secara kognitif siswa merasakan adanya ketercapaian yang cukup memuaskan. Siswa merasa pak Andhy dapat menjelaskan materi dengan baik sehingga siswa dapat mengerjakan soal ujian yang diberikan dengan lancar. Hasil ujian mereka cukup bagus dan mereka dapat memahami peristiwa sejarah dengan jelas.

c. Pengelolaan kelas

Waktu yang terbatas juga menjadi alasan utama pengelolaan kelas yang standar selama pembelajaran. Seperti yang telah dirancang dalam RPP, guru memulai kelas dengan apersepsi, memberikan motivasi pada siswa untuk mempelajari sejarah, kemudian menjelaskan materi. Jumlah siswa 20 orang dalam satu kelas dianggap efektif dan kondusif dalam proses pembelajaran. Kelas dilengkapi LCD proyektor, papan tulis dan jumlah bangku sejumlah siswa yang menunjang suasana kondusif. Semua kelas dalam keadaan pencahayaan yang baik sehingga siswa dan guru dapat melakukan pembelajaran dengan lancar.

d. Metode/ strategi

Pembelajaran sejarah memiliki tantangan tersendiri untuk keluar dari pandangan konservatif dengan menggunakan pembelajaran ceramah. Dalam

kurikulum berbasis kompetensi juga disebutkan bahwa pembelajaran yang menggunakan berbagai metode dan strategi yang melibatkan siswa akan memudahkan pencapaian kompetensi siswa secara langsung. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi menjadi esensi terpenting dalam pembelajaran sejarah berbasis kompetensi.

Pembelajaran IPS kompetensi dasar sejarah di SMP Kartika Nasional Plus masih menggunakan metode ceramah secara dominan. Selain berhubungan dengan alokasi waktu yang terbatas, pencapaian siswa di ranah kognitif dianggap lebih penting karena terlihat jelas saat ujian di sekolah. Tahapan pembelajaran di dalam kelas dimulai dengan pemberian apersepsi berdasarkan RPP kemudian materi disampaikan di depan kelas dengan bantuan LCD proyektor. Selama 40 menit pembelajaran di dalam kelas, guru menerangkan materi sejarah yang ada di layar. Sesekali guru melibatkan siswa ke dalam diskusi untuk memancing partisipasi siswa. Namun selebihnya guru menyampaikan materi dengan ceramah. Modifikasi yang dilakukan guru adalah tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang disampaikan.

e. Media dan sumber belajar

Media yang digunakan sama seperti pembelajaran sejarah pada umumnya yaitu buku penunjang dan peta konsep. Peta konsep dibuat oleh guru kemudian disalin oleh siswa untuk memudahkan pemahaman terhadap materi. Berikut hasil wawancara dengan bapak Andhy,

“saya yang membuat peta konsepnya mbak.

Anak – anak tinggal meniru saja. Karena waktu mengajar saya juga terbatas.”²⁸

Pembuatan peta konsep seharusnya dilakukan oleh siswa sebagai salah satu aplikasi *learning by doing* dan mengajarkan pengalaman membuat alat yang dapat mempermudah siswa memahami pembelajaran. Namun dalam penyelenggaraan di lapangan, guru lebih memilih untuk menunda langkah tersebut untuk mensiasati waktu pembelajaran yang terbatas. Berbagai upaya mencari materi dalam media yang berbeda menurut bapak Andhy sangat membantu pengembangan silabus dan instrument untuk pembelajaran siswa.

f. Interaksi dan partisipasi siswa

Partisipasi siswa dikembangkan guru sejarah dengan mengadakan diskusi di dalam kelas. Guru memberikan pertanyaan – pertanyaan pancingan agar dijawab oleh siswa. Beberapa siswa aktif menjawab meski masih ada beberapa siswa yang pasif dan hanya sekedar mendengarkan. Lebih lanjut pak Andhy menuturkan,

²⁷ Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Sejarah kelas 8 SMP Kartika Nasional Plus Surabaya Bapak Andhy pada tanggal 29 Oktober 2013 pukul 14.53 berlokasi di ruang guru SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Selengkapnya ada di lampiran hasil wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah.

²⁸ Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Sejarah kelas 8 SMP Kartika Nasional Plus Surabaya Bapak Andhy pada tanggal 29 Oktober 2013 pukul 14.53 berlokasi di ruang guru SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Selengkapnya ada di lampiran hasil wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah.

“Siswa yang berhasil menjawab akan mendapat tambahan nilai sebagai *reward* atas keaktifan mengikuti pembelajaran. Itu untuk merangsang keaktifan anak – anak mbak.”²⁹

Keaktifan siswa memang menjadi tantangan setiap guru dalam pembelajaran yang mereka ajarkan. Partisipasi siswa yang mencerminkan sebuah pembelajaran berbasis kompetensi berjalan baik merupakan situasi yang diidam – idamkan setiap guru di sekolah. Dalam upaya memancing keaktifan siswa, guru melakukan beberapa inovasi dalam pembelajaran. Pak Andhy memilih memberikan *reward* bagi setiap siswa yang aktif dalam pembelajaran dan merangsang siswa lain melakukan hal yang sama. Hasil yang didapat interaksi antar siswa selama pengamatan cukup baik. Meski terkesan masih sering bermain – main namun beberapa siswa terlihat mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh – sungguh. Hal tersebut juga terlihat saat siswa mengerjakan soal dan angket yang diberikan peneliti. Siswa berusaha mengerjakan soal secara mandiri dan mengerjakan angket sesuai dengan penilaian pribadi mereka terhadap pembelajaran sejarah di kelas.

g. Evaluasi

Evaluasi yang diberikan untuk pembelajaran IPS kompetensi dasar sejarah di SMP Kartika Nasional Plus dilakukan di ketiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil wawancara dengan guru sejarah diperoleh informasi aspek kognitif dinilai dengan tes tertulis mengenai materi yang diajarkan saat ulangan harian, tes sub sumatif dan tes sumatif. Penilaian afektif yang berhubungan dengan sikap siswa dinilai dari keaktifan dan interaksi siswa dalam diskusi yang diselenggarakan di dalam kelas. Sedangkan penilaian psikomotorik yang berhubungan dengan keterampilan motorik siswa dinilai dari diskusi dan pembuatan media power point.

Permasalahan keterbatasan waktu kembali menjadi momok bagi guru – guru yang mengajar mata pelajaran dengan jam terbatas. Mata pelajaran sejarah merupakan salah satunya. Dengan alokasi waktu pembelajaran 40 menit tiap minggu, *pre test* dan *post test* yang sesungguhnya dapat mengukur ketercapaian belajar siswa menjadi agak sulit untuk dilakukan. Guru menganggap *pre test* dan *post test* menyita waktu dan memilih untuk menunda pelaksanaan kedua tes tersebut. Sebagai gantinya guru tetap fokus pada evaluasi pembelajaran saat akhir semester maupun pertengahan semester. Kriteria ketuntasan minimal untuk mata pelajaran IPS di SMP Kartika Nasional Plus adalah 70. Bagi siswa yang mendapat nilai kurang dari 70 akan diberikan remedial untuk menambah pemahaman siswa terhadap materi sejarah.

4. Penilaian Hasil (*Product*)

a. Hasil belajar siswa secara akademik

Hasil belajar siswa secara akademik dilaporkan di dalam buku rapor yang diterbitkan setiap satu semester kepada orang tua murid. Nilai akademik yang diperoleh siswa pada kompetensi dasar sejarah digabungkan menjadi satu dengan kompetensi dasar geografi dan ekonomi dalam kesatuan mata pelajaran IPS. Untuk nilai kompetensi dasar sejarah menurut bapak Andhy sebagian besar siswa telah mencapai ketuntasan minimal. Dalam penelitian ini, diberikan soal yang berisi materi sejarah yang dibagikan dan dikerjakan oleh seluruh siswa secara mandiri. Materi yang diberikan sesuai dengan yang diajarkan oleh guru selama semester satu. Pemberian soal ini sebagai langkah untuk mengkonfirmasi penguasaan siswa secara umum tentang materi sejarah.

Berdasarkan tes tentang materi sejarah yang disebarkan peneliti dalam bentuk sepuluh soal pilihan ganda materi sejarah semester satu, nilai rata – rata semua anak di kelas 8.1 dan 8.2 adalah 72. Rata – rata nilai siswa kelas 8.1 adalah 78 sedangkan kelas 8.2 lebih rendah di angka 66,11. Mayoritas siswa telah mengerjakan dengan baik dan memperoleh hasil yang cukup memuaskan. 90% siswa di kelas 8.1 memperoleh nilai di atas 70, hal itu berarti melebihi nilai ketuntasan minimal yang disyaratkan oleh sekolah. Nilai tertinggi adalah 100 yang didapat oleh satu orang siswa dan nilai terendah adalah 50 yang juga didapat oleh satu orang siswa. Sebaran kemampuan siswa merata di atas KKM sesuai dengan pernyataan Pak Andhy sebagai guru sejarah kelas 8.

Tidak jauh berbeda dengan kelas 8.1, hasil yang didapatkan dari pengerjaan soal siswa kelas 8.2 masih cukup memuaskan. Sebanyak 11 orang siswa mendapat nilai di atas KKM, hal itu dapat juga dikatakan 55% dari 18 siswa telah berada di atas ketuntasan minimal. Sedangkan 7 orang sisanya mendapat nilai dibawah 70 dengan rentang nilai terendah adalah 20. Di kelas 8.2 kemampuan akademik siswa cenderung lebih beragam dibanding kelas 8.1. meskipun begitu sebagian besar siswa telah di atas kriteria ketuntasan yang ditentukan sekolah untuk mata pelajaran IPS, khususnya kompetensi dasar sejarah. Hasil belajar tersebut menunjukkan ketuntasan secara kognitif siswa dalam mata pelajaran IPS kompetensi dasar sejarah.

b. Hasil Belajar Siswa Secara Non Akademik

Sejarah sebagai pelajaran penting pembangun rasa cinta tanah air tentu saja tidak seharusnya hanya mendapat prestasi di bidang kognitif. Secara afektif dan psikomotorik *goal* pembelajaran sejarah seharusnya juga mendapat prestasi yang sama. Tujuan pembelajaran IPS yang menegaskan tentang pentingnya memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial sesungguhnya bias terbangun melalui

²⁹ Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Sejarah kelas 8 SMP Kartika Nasional Plus Surabaya Bapak Andhy pada tanggal 29 Oktober 2013 pukul 14.53 berlokasi di ruang guru SMP Kartika Nasional Plus Surabaya. Selengkapny ada di lampiran hasil wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah.

pembelajaran IPS kompetensi dasar sejarah. Hasil belajar siswa SMP Kartika Nasional Plus Surabaya tidak memiliki prestasi khusus di bidang non akademik yang berhubungan dengan sejarah. Selain minimnya jam pelajaran dan informasi lomba, 31 orang dari 42 siswa mengaku tidak menyukai pelajaran sejarah. Ketidaksukaan tersebut menumbuhkan keengganan siswa dalam berpartisipasi dalam kompetensi tentang sejarah.

5. Penilaian Keluaran (*Outcome*)

Penilaian keluaran dalam evaluasi hasil implementasi kurikulum berbasis kompetensi pada mata pelajaran IPS kompetensi dasar sejarah dititik beratkan pada hasil akhir siswa setelah penerapan KBK di sekolah dan dampak kegunaan dalam diri siswa sebagai gambaran bahwa upaya pencapaian tujuan penguasaan kompetensi telah dilaksanakan. Dalam angket yang dikerjakan oleh siswa terdapat enam dari total 25 pertanyaan yang berfokus pada dampak kegunaan pembelajaran sejarah di sekolah pada diri siswa.

Hasil tersebut tercermin dalam angket yang dibagikan kepada siswa tentang dampak yang mereka rasakan selama pembelajaran sejarah berlangsung di sekolah mereka. Saat siswa ditanya apakah mereka merasakan manfaat belajar sejarah dalam kehidupan sehari – hari, 31 siswa menjawab tidak sedangkan 7 lainnya merasa mendapat manfaat. Pertanyaan selanjutnya apakah pelajaran sejarah menambah rasa ingin tahu terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat, 30 siswa menjawab tidak sedangkan 9 orang siswa tumbuh rasa ingin tahunya. Pertanyaan tentang sejarah menambah kemampuan berkomunikasi dijawab tidak oleh 36 siswa dan dijawab iya oleh 3 orang saja. Pelajaran sejarah juga dianggap tidak menambah kemampuan bekerja sama dan berkompetisi oleh 30 orang siswa meski 8 siswa lain merasa sebaliknya.

Siswa kelas 8 SMP Kartika Nasional Plus Surabaya beranggapan bahwa pembelajaran sejarah yang berlangsung di sekolah mereka tidak membuat mereka menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Jumlah yang mengatakan tidak setuju ada 27 orang dan sisanya yaitu 13 orang menjawab setuju. Pada akhirnya, menurut 14 orang siswa, pembelajaran sejarah membuat mereka menjadi warga dunia yang cinta damai dengan jawaban kontra dikeluarkan oleh 25 orang sisanya.

Secara jujur siswa menjawab angket tentang kegunaan pembelajaran sejarah dalam kehidupan sehari – hari mereka. 81% siswa secara mengejutkan menjawab bahwa pembelajaran yang diajarkan di sekolah mereka tidak memberikan manfaat bagi kehidupan sehari – hari mereka. Hasil tersebut cukup mencengangkan sebab hal tersebut membuktikan implementasi kurikulum berbasis kompetensi di sekolah mereka tidak berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Secara global, pembelajaran sejarah yang diajarkan dinilai kurang sesuai dengan kurikulum dan berakibat pada minimnya manfaat yang dirasakan siswa sebagai pengguna kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi yang telah disesuaikan

dengan sekolah melalui KTSP belum tercapai dengan baik dinilai dari manfaat yang dirasakan oleh pengguna kurikulum, yaitu siswa.

Dari hasil penyajian data dapat diketahui bahwa tingkat keterlaksanaan kurikulum di SMP Kartika Nasional Plus Surabaya dengan menggunakan rumus presentase adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \% \\ = \frac{12}{20} \times 100 \% \\ = 60\%$$

Dari 20 poin untuk menilai apakah kurikulum telah dilaksanakan dari 5 aspek yaitu konteks, masukan, proses, produk dan keluaran, pembelajaran IPS yang dilakukan pada kompetensi dasar sejarah di SMP Kartika Nasional Plus Surabaya hanya tercapai 12 poin. Prosentase keterlaksanaan baru 60% sehingga menunjukkan masih ada 40% elemen kurikulum tingkat satuan pendidikan yang belum tercapai dengan baik. Elemen tersebut antara lain tidak adanya *pre test* dan *post test* karena keterbatasan waktu pembelajaran, RPP yang belum berbasis pembelajaran berpusat pada siswa melainkan berpusat pada guru yang melakukan ceramah terkait materi pembelajaran, tidak adanya dukungan dana dari pemerintah karena dana didapat dari sumbangan orang tua siswa, penyampaian pembelajaran tidak bervariasi hanya ceramah oleh guru, sumber pembelajaran yang kurang bervariasi, tidak ada pengalaman lapangan, prestasi siswa di bidang non akademik yang berhubungan dengan sejarah tidak ada dan kurangnya manfaat pembelajaran sejarah secara langsung yang dirasakan siswa dalam kehidupan sehari – hari mereka.

Kekurangan 40% memang terlihat cukup meresahkan karena esensi kurikulum berbasis kompetensi yang diajarkan disekolah melalui kurikulum tingkat satuan pendidikan belum tercapai secara keseluruhan. Poin – poin pembelajaran yang variatif, berpusat pada siswa dengan mengutamakan pengalaman lapangan sebagai esensi kurikulum berbasis kompetensi belum terlaksana dengan baik. Dalam jangka panjang ketidaksesuaian implementasi kurikulum dengan yang dilaksanakan para guru di lapangan merupakan bom waktu di dunia pendidikan Indonesia. Kurikulum yang dirancang dimaksudkan sebagai koridor pengajaran yang disertai langkah – langkah untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Apabila dalam pelaksanaannya dilakukan melenceng dari koridor, kurikulum hanya akan menjadi sebuah langkah teknis dalam kertas tanpa realisasi jelas. Hasil evaluasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan mata pelajaran IPS kompetensi dasar sejarah di SMP Kartika Nasional Plus Surabaya dapat disimpulkan telah berjalan dengan *cukup* karena prosentase hanya mencapai 60% dari penilaian aspek konteks, masukan, proses, produk dan keluaran yang telah dijabarkan pada poin – poin table keterlaksanaan kurikulum.

A. Pembahasan

1. Penilaian Konteks (*Context*)

Kurikulum berbasis kompetensi sejatinya dilahirkan akibat adanya keprihatinan antara sekolah sebagai pembentuk siswa telah menciptakan produk yang kurang sesuai dengan penggunaannya, yaitu masyarakat. Akibat keprihatinan itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk merevolusi pandangan sekolah agar kembali menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan masyarakat. Produk tersebut dalam hal ini siswa harus memiliki kemampuan individu yang mumpuni dalam menguasai berbagai kompetensi yang diajarkan pada setiap mata pelajaran dalam setiap aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Berangkat dari keprihatinan yang sama, SMP Kartika Nasional Plus juga menetapkan visi misi sekolah untuk ikut membekali siswa dengan berbagai bekal secara akademik maupun non akademik. Kurikulum tingkat satuan pembelajaran SMP Kartika Nasional Plus berupaya melakukan sinergi antara Kurikulum Berbasis kompetensi dengan pandangan yang mereka miliki.

SMP Kartika Nasional Plus menggunakan seluruh kekuatan, peluang, dan berusaha meminimalkan hambatan pada potensi yang dimiliki sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum berbasis kompetensi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mulyasa bahwa pendidikan dalam era kurikulum berbasis kompetensi berfungsi mengkondisikan lingkungan untuk membantu peserta didik mengembangkan potensinya dengan maksimal³⁰. Selain lingkungan fisik dalam bentuk sekolah yang berada di tengah kota dengan akses mudah, factor kedekatan guru dengan siswa, perhatian orang tua dan dukungan sekolah terhadap bakat siswa merupakan asset yang sangat berharga untuk mengembangkan potensi siswa SMP Kartika Nasional Plus yang sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi.

2. Penilaian Masukan (Input)

Penilaian masukan pada evaluasi hasil implementasi kurikulum berbasis kompetensi di SMP Kartika Nasional Plus meliputi kurikulum, siswa, guru, rencana pembelajaran, program penunjang, serta dana operasional yang digunakan oleh sekolah. Pada penilaian pertama masukan yaitu kurikulum belum terlaksana dengan baik. Pembelajaran IPS seharusnya dilaksanakan secara terpadu dalam koridor kurikulum berbasis kompetensi. Namun pembelajaran sejarah di SMP Kartika Nasional Plus dilaksanakan secara terpisah. Meskipun begitu secara keseluruhan jiwa dari kurikulum berbasis kompetensi telah dijalankan dengan baik oleh sekolah. Sekolah berupaya mengintegrasikan KBK dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka memadukan IPS yang berbasis media dan teknologi. Penggunaan layar proyektor, wifi dan sumber pelajaran lain mendorong pembelajaran berbasis IT selain aplikasi konsep belajar tuntas. Masukan teknologi telah sesuai dengan prinsip pengembangan KBK kelima menurut

Mulyasa yaitu penyesuaian menghadapi abad pengetahuan dan teknologi³¹.

Penilaian masukan yang kedua yaitu siswa telah terlaksana dengan baik. SMP Kartika Nasional Plus melakukan tes tertulis saat seleksi penerimaan siswa baru untuk pengumpulan data siswa, kemudian menetapkan rombongan belajar ideal dengan jumlah siswa 20-25 orang perkelas. Kondisi jumlah siswa tersebut menyumbang suasana kondusif di dalam kelas saat pembelajaran. Komposisi keberagaman agama siswa juga menciptakan kerukunan antar umat beragama sehingga sesuai dengan prinsip pengembangan KBK pertama tentang keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Siswa – siswi di SMP Kartika Nasional Plus bahkan mengamalkan secara langsung nilai luhur dalam menghormati dan menghargai umat beragama lain dalam interaksi dengan sesama teman.

Penilaian masukan yang ketiga yaitu guru juga telah sesuai dengan yang dianjurkan dalam kurikulum. Jumlah guru sekitar 20 orang dinilai tepat tidak berlebihan maupun kekurangan untuk mengajar seluruh jumlah siswa di SMP Kartika Nasional Plus. Guru yang mengajar juga memiliki latar belakang yang sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka ajarkan. Guru IPS yang mengajar kompetensi dasar sejarah merupakan lulusan jurusan pendidikan sejarah sehingga dianggap memiliki bekal yang sesuai untuk mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi dalam pembelajaran yang diajarkan.

Penilaian masukan keempat yaitu rencana pembelajaran belum terpenuhi secara maksimal. Pembelajaran IPS yang diamanatkan dalam kurikulum berbasis kompetensi seharusnya dilaksanakan secara terpadu antara sejarah, geografi dan ekonomi. Namun yang terjadi di lapangan RPP yang disusun oleh guru hanya digunakan untuk mengajar kompetensi dasar sejarah karena IPS dilaksanakan secara terpisah. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan tujuan utama IPS terpadu yaitu mengenal konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sekaligus memecahkan masalah dan terampil dalam kehidupan sosial. Pembelajaran IPS yang terpisah membuat pemahaman siswa tidak dapat terintegrasi dalam memahami konsep – konsep ilmu sosial. Meski guru beranggapan bahwa geografi dan sejarah tidak berkesinambungan, pada kenyataannya geografi dan sejarah sengaja dipadukan untuk memudahkan siswa mengenali perubahan masyarakat dan konteks wilayahnya. Guru mungkin hanya menyoroti dari aspek kognitif tentang sulitnya menjelaskan materi sejarah berbarengan dengan geografi karena sejarah akan kalah dominan. Padahal apabila dilihat dari sisi yang lain, sejarah dan geografi yang diajarkan secara terpadu akan membuat siswa menjadi *problem solver* dan warga Negara yang cinta damai.

Penilaian masukan untuk program pendukung belum bekerja secara maksimal. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan adanya sebuah pengalaman nyata dalam setiap pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami dan mampu menyerap pelajaran untuk

³⁰ E. Mulyasa. 2006. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosda Karya Hlm. 57

³¹ *Ibid* hlm 71

bekalnya di masa depan kelak. *Learning by doing* sejalan dengan konsep KBK yaitu pengalaman lapangan yang melibatkan siswa, guru serta masyarakat dimana mereka secara langsung terjun untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Namun pembelajaran IPS kompetensi dasar sejarah yang diajarkan di SMP Kartika Nasional Plus kelas 8 kurang mengaplikasikan pengalaman lapangan tersebut. Tidak adanya program penunjang yang dimaksudkan untuk pengalaman lapangan membuat siswa jarang melakukan pembelajaran langsung dalam materi sejarah.

3. Penilaian Proses (*Process*)

Penilaian proses terdiri dari tujuan dan materi pembelajaran, alokasi waktu, pengelolaan kelas, metode, media, partisipasi dan interaksi siswa, serta evaluasi. Sebelumnya telah dibahas bahwa masukan rencana pembelajaran IPS telah dilakukan secara terpisah, tidak sesuai dengan yang diamanatkan kurikulum berbasis kompetensi. Rencana pembelajaran kompetensi dasar sejarah diaplikasikan dalam kelas tersendiri tanpa terintegrasi dengan kompetensi dasar geografi dan ekonomi. Akibat perubahan rencana pembelajaran tersebut, materi dan tujuan pembelajaran ikut mengalami perubahan menjadi spesifik mengarah pada pencapaian kompetensi dasar sejarah.

Tujuan pembelajaran sejarah yang disusun oleh guru di SMP Kartika Nasional Plus Surabaya telah tertulis secara terpisah antara tujuan pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotorik. Tujuan secara kognitif masih didominasi perintah mendeskripsikan dan mengidentifikasi sedangkan tujuan psikomotorik didominasi perintah menyebutkan. Tujuan secara afektif lebih beragam dengan menyebutkan siswa dapat melakukan komunikasi melalui pertanyaan dan jawaban serta memberikan tanggapan dan pendapat atas materi yang disampaikan. Pada dasarnya tujuan kognitif, afektif dan psikomotorik yang disusun baru berkisar pada satu jenis standar pendidikan saja, yaitu standar akademik yang merefleksikan pengetahuan dan esensi setiap disiplin ilmu³². Standar kompetensi yang menunjukkan bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan peserta didik sebagai penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari belum nampak tertulis dalam tujuan pembelajaran sejarah di SMP Kartika Nasional Plus kelas 8³³. Guru hanya menyusun tujuan pembelajaran secara akademis dan belum memasukkan tujuan pembelajaran menurut standar kompetensi. Akibatnya, siswa hanya melakukan perintah akademik tanpa memiliki kesan yang mendalam terhadap pelajaran sejarah. Kurikulum berbasis kompetensi nyatanya kurang lengkap diaplikasikan dalam pembelajaran sejarah di SMP Kartika Nasional Plus kelas 8.

Kurang lengkapnya tujuan pembelajaran yang tidak mengarah pada standar kompetensi turut mempengaruhi materi sejarah yang diajarkan. Guru hanya menggunakan materi yang ada di buku penunjang

dan tidak memaksimalkan semua sumber belajar di sekitar siswa. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip utama KBK yang mengusung pembelajaran dari segala sumber pembelajaran bernilai edukatif. Apalagi sejarah mengkaji manusia dan perubahan kebudayaan sangat erat berkaitan dengan pengalaman lapangan untuk langsung mengamati masyarakat, namun tujuan dan materi sejarah yang diajarkan di kelas 8 SMP Kartika Nasional Plus belum mengarah ke arah tersebut dan hanya terpaku pada standar akademis nilai di dalam kelas secara kognitif.

Media, metode dan pengelolaan kelas pembelajaran sejarah juga dirancang secara terbatas tanpa mengindahkan prinsip – prinsip pengembangan KBK yang bersinergi dengan lingkungan untuk menumbuhkan potensi siswa. Media yang digunakan berkisar penggunaan teknologi proyektor LCD tanpa menghadirkan pengalaman kepada siswa secara langsung melalui situs sejarah maupun peninggalan fisik sebuah peristiwa. Metode yang dilaksanakan masih konservatif melalui ceramah dan Tanya jawab seputar materi yang menegaskan bahwa standar yang dijadikan acuan hanyalah standar akademik, bukannya standar kompetensi yang aktif melibatkan siswa. Pengelolaan kelas dilakukan secara standar dengan transfer pengetahuan sebagai focus utamanya. Akibatnya interaksi yang dilakukan antara siswa menjadi terbatas dan membosankan sehingga tingkat partisipasi siswa menjadi rendah meski guru telah memberikan stimulus lewat *reward point* bagi siswa yang aktif menjawab pertanyaan. Instrumen evaluasi yang disusun guru hanya tes tulis untuk ulangan harian, sub sumatif dan sumatif. Instrumen untuk mengukur nilai afektif siswa tidak dibuat secara jelas sehingga menegaskan bahwa tes kognitif menjadi lebih diutamakan dalam pembelajaran sejarah disbanding penguasaan kompetensi dalam penerapan pengetahuan.

Penilaian proses secara keseluruhan berjalan dengan timpang. Guru mendesain pembelajaran IPS kompetensi dasar sejarah hanya berfokus pada pencapaian standar akademik melalui penguasaan pengetahuan kognitif dan mengabaikan standar kompetensi yang menjadi jiwa kurikulum berbasis kompetensi melalui unjuk penerapan pengetahuan secara kognitif, afektif dan psikomotorik. Teori kurikulum berbasis kompetensi belum diaplikasikan secara maksimal dalam pembelajaran sejarah di SMP Kartika Nasional Plus khususnya di kelas 8.

4. Penilaian Hasil (*Product*)

Hasil yang dinilai merupakan perubahan yang terjadi dari aspek masukan yaitu siswa, guru, RPP, kurikulum dan program pendukung. Perubahan pada siswa yang dikarenakan aspek guru, kurikulum dan RPP yang diajarkan terlihat pada hasil akademik siswa pada pelajaran IPS kompetensi dasar sejarah kelas 8. Hasil akademik menurut hasil penelitian telah berjalan dengan baik terlihat dari nilai ulangan yang mencapai ketuntasan minimal untuk sebagian besar siswa serta hasil tes pilihan ganda tentang materi sejarah kelas 8 yang dibagikan peneliti rata – rata anak mendapat skor di atas 70.

³² *Ibid* hlm 24

³³ *Ibid*

Ketuntasan secara materi sesuai dengan konsep kurikulum berbasis kompetensi dalam strategi belajar tuntas yaitu peningkatan mutu pendidikan secara mikro³⁴. Pada kurikulum berbasis kompetensi, siswa dimonitor melalui hasil pembelajaran yang dilakukan utamanya secara akademik. Siswa yang mengalami keterlambatan secara akademik akan diberikan arahan tambahan dari guru agar menguasai materi yang sama dengan siswa lain. Proses ini disebut remedial yang juga diberlakukan di SMP Kartika Nasional Plus khususnya pada mata pelajaran IPS kompetensi dasar sejarah. Siswa kelas 8 SMP Kartika Nasional Plus mengaku pelajaran sejarah yang dilaksanakan selama 40 menit tiap minggu hanya memberikan pengetahuan tentang sejarah tetapi tidak memberikan makna yang mendalam tentang rasa cinta tanah air. Hampir seluruh siswa mengakui hal yang sama pada angket mereka bahwa pembelajaran sejarah tidak menambah rasa cinta tanah air siswa.

5. Penilaian Keluaran (Outcome)

Kurikulum berbasis kompetensi sebagai kebijakan publik yang memiliki tugas penting dalam merubah pendidikan di masyarakat untuk bersaing pada tingkat internasional belum terlaksana dengan baik dalam pembelajaran sejarah di kelas 8 SMP Kartika Nasional Plus. Dampak implementasi kurikulum berbasis kompetensi belum tercapai sepenuhnya karena siswa yang mengalami proses pembelajaran belum berhasil mendapat manfaat yang sesuai dengan *grand design* tujuan kurikulum berbasis kompetensi. Pembelajaran sejarah yang hanya berprestasi di bidang akademik namun tidak memberikan kontribusi pada bangsa tidak akan menghasilkan siswa yang kelas menjadi warga masyarakat yang dapat bersaing di tingkat global. Pada akhirnya, ditinjau dari hasil keluaran, kurikulum berbasis kompetensi yang diimplementasikan pada pembelajaran sejarah kelas 8 di SMP Kartika Nasional Plus Surabaya belum menunjukkan dampak yang sesuai dengan tujuan KBK yaitu menghasilkan siswa yang tidak hanya pandai secara akademik melainkan juga menguasai kompetensi untuk bersaing dalam masyarakat global.

5. Kesimpulan

Dari hasil penyajian data yang telah dipaparkan maka hasil implementasi kurikulum berbasis kompetensi pada siswa kelas 8 SMP Kartika Nasional Plus Surabaya adalah sebagai berikut :

Penilaian konteks telah terpenuhi dengan baik pada table keterlaksanaan dari kesesuaian visi misi sekolah dengan kurikulum berbasis kompetensi. Penilaian masukan telah berjalan cukup baik dengan terpenuhinya 5 aspek yaitu kurikulum, siswa, guru, program pendukung dan dana operasional meski RPP yang disusun dalam pembelajaran belum beragam dan masih memusatkan pembelajaran pada guru yang melakukan metode ceramah. Penilaian proses kurang berjalan dengan baik. Dari 7 aspek keterlaksanaan hanya 4 yang terlaksana sedangkan 3 sisanya belum terlaksana dengan

baik melingkupi metode pembelajaran, sumber pelajaran yang beragam dan tidak adanya pengalaman lapangan yang dilakukan selama pembelajaran. Penilaian hasil belum terpenuhi di salah satu aspek yaitu hasil prestasi di bidang non akademik sedangkan hasil belajar secara akademik telah berjalan dengan baik. Penilaian keluaran belum terpenuhi. Dampak yang dirasakan siswa sebagai manfaat belajar sejarah belum mendapat jawaban positif karena berdasarkan 6 poin yang ada pada angket, mayoritas siswa menjawab tidak mendapat manfaat belajar sejarah baik dari segi menambah kemampuan berkomunikasi, rasa ingin tahu, berkomitmen pada nilai – nilai kemanusiaan maupun menjadi warga Negara yang demokratis dan cinta damai. Secara keseluruhan hasil implementasi kurikulum berbasis kompetensi pada siswa kelas 8 SMP Kartika Nasional Plus Surabaya belum berjalan dengan baik karena dari seluruh table keterlaksanaan hanya tercapai 60% saja.

SARAN

Implementasi kurikulum membutuhkan komitmen segala pihak untuk memaksimalkan aplikasi teori dan pelaksanaan di sekolah. Guru, kepala sekolah maupun siswa dapat bersinergi mewujudkan KBK yang terapkan dengan benar sesuai dengan teori yang telah disusun oleh pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- E. Mulyasa. 2006. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Hasan, Hamid. 2008. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Joko Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 Bab I
- Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Pelayanan Profesional Kurikulum 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi*, - Jakarta:Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas
- Subarsono, Ag. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudjana, Nana. 1989. *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah Kejuruan*. Bandung: PT Sinar Baru
- Syaodih, Nana. 2008. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya

³⁴ Ibid Hlm 55